



Merajut Asa di Tanah Mutiara Hitam: Analisis Faktor Penghambat Dan Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Pedalaman Papua

Sinta Evenia Simbolon^{1*}, Erni Murniarti¹, Bintang R Simbolon¹

¹ Program Magister Administrasi Pendidikan Universitas Kristen Indonesia

*Correspondingauthoremail: sintaeveniasimbolon2@gmail.com

Article Info

Article history:

Received 28 November, 2025

Approved 30 January, 2026

Keywords:

*Papua Education Quality;
Education Improvement
Strategy*

ABSTRACT

This research analyses the inhibiting factors and formulates strategies to improve the quality of education in inland Papua, known as the "Land of the Black Pearl". Although the region is rich in natural resources, Papua still faces significant challenges in education access and quality compared to other regions in Indonesia. Using a qualitative approach, data was collected through in-depth interviews with stakeholders, field observations and analyses of relevant documents. This research was conducted in school SD INPRES 40 Aimasi Papua Barat in May-June 2025, involving 8 teachers as participants. The results identified several key inhibiting factors, including limited infrastructure, a shortage and inequality of qualified educators, a curriculum that lacks relevance to the local context, extreme geographical challenges, and socio-cultural and economic factors of the local community. Based on these findings, the study proposes a comprehensive education quality improvement strategy. These strategies include developing adaptive infrastructure, increasing the capacity and equitable distribution of teachers, developing local wisdom-based curricula, utilising information and communication technology (ICT) for distance education, and strengthening the role of communities and local governments in supporting education. It is hoped that this research can make a real contribution to the formulation of more effective policies and intervention programmes.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor penghambat dan merumuskan strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di pedalaman Papua, yang dikenal sebagai "Tanah Mutiara Hitam". Meskipun wilayah ini kaya akan sumber daya alam, Papua masih menghadapi tantangan signifikan dalam akses dan kualitas pendidikan dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, observasi lapangan, dan analisis dokumen terkait. Penelitian ini dilakukan di sekolah SD INPRES 40 Aimasi Papua Barat pada bulan Mei-Juni 2025, dengan melibatkan 8 guru sebagai partisipan. Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa faktor penghambat utama, meliputi keterbatasan infrastruktur, kekurangan dan ketidakmerataan tenaga pendidik berkualitas, kurikulum yang kurang relevan dengan konteks lokal, tantangan geografis yang ekstrem, serta faktor sosial-budaya dan ekonomi masyarakat setempat. Berdasarkan temuan ini, penelitian mengusulkan strategi peningkatan kualitas pendidikan yang komprehensif. Strategi tersebut mencakup pengembangan infrastruktur adaptif, peningkatan kapasitas dan pemerataan distribusi guru, pengembangan kurikulum berbasis kearifan lokal,

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pendidikan jarak jauh, serta penguatan peran komunitas dan pemerintah daerah dalam mendukung pendidikan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dan program intervensi yang tepat sasaran demi terwujudnya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang berkeadilan di pedalaman Papua.

Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Simbolon, S. E., Murniarti, E., & Simbolon, B. R. (2026). Merajut Asa di Tanah Mutiara Hitam: Analisis Faktor Penghambat dan Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Pedalaman Papua. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 7(1), 596–610. <https://doi.org/10.55681/jige.v7i1.5103>

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan elemen fundamental dalam proses pembangunan suatu bangsa. Tidak hanya menjadi hak asasi setiap individu, pendidikan juga berfungsi sebagai sarana untuk mentransformasikan nilai-nilai budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, pendidikan menjadi salah satu instrumen utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing di tengah tantangan globalisasi dan revolusi industri 4.0. Amanat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa telah tertuang secara jelas dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hal ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menekankan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya.

Kendati kerangka normatif dan kebijakan pendidikan nasional telah dirumuskan secara jelas, realitas di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan antara konsep ideal pendidikan dan pelaksanaannya, terutama di daerah-daerah tertinggal, terpencil, dan terluar (3T). Ketimpangan ini mencakup aspek aksesibilitas, mutu layanan pendidikan, distribusi sumber daya manusia (SDM) pendidikan, serta relevansi kurikulum terhadap kondisi lokal. Salah satu wilayah yang paling mencerminkan permasalahan tersebut adalah Provinsi Papua, khususnya di wilayah pedalaman yang relatif terisolasi dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan administratif.

Papua, sering dijuluki sebagai “Tanah Mutiara Hitam” karena kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah, menghadapi tantangan multidimensional dalam bidang pendidikan. Di balik pesona kekayaan alam dan keanekaragaman budaya yang dimiliki, terdapat realitas sosial yang mengkhawatirkan, khususnya dalam hal keterjangkauan pendidikan yang berkualitas. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di Provinsi Papua hanya mencapai 6,44 tahun, jauh tertinggal dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 8,69 tahun. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada aspek pendidikan juga menempatkan Papua di peringkat terbawah dari seluruh provinsi di Indonesia. Rendahnya partisipasi pendidikan, tingginya angka putus sekolah, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Papua, khususnya di wilayah pedalaman, masih berada dalam kondisi yang memprihatinkan.

Masalah akses menjadi salah satu faktor dominan yang menghambat perkembangan pendidikan di pedalaman Papua. Banyak sekolah yang berada di lokasi yang sulit dijangkau, bahkan hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki berjam-jam melintasi hutan, pegunungan,

dan sungai. Dalam laporan Yayasan Literasi Papua (2022), disebutkan bahwa sebagian besar siswa dan guru di pedalaman harus melewati medan berat untuk mencapai sekolah. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat kehadiran siswa dan guru, serta ketidakteraturan proses pembelajaran. Selain itu, sebagian besar sekolah di wilayah ini masih kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas yang layak, perpustakaan, laboratorium, dan akses listrik maupun internet. Keadaan ini memperburuk kualitas pembelajaran dan melemahkan semangat belajar peserta didik.

Selain faktor geografis, kekurangan tenaga pendidik juga menjadi persoalan serius. Banyak sekolah yang hanya memiliki satu atau dua orang guru untuk mengajar semua mata pelajaran dari berbagai jenjang kelas. Hal ini menyebabkan beban kerja guru menjadi sangat tinggi, serta berdampak pada rendahnya efektivitas pembelajaran. Dalam beberapa kasus, guru yang berasal dari luar Papua sering kali mengalami kesulitan beradaptasi dengan budaya lokal dan kondisi lingkungan yang ekstrem, sehingga mereka memilih untuk tidak melanjutkan pengabdianya. Akibatnya, tingkat rotasi guru di daerah ini sangat tinggi, dan kontinuitas proses pendidikan menjadi terganggu (Alik, 2024).

Permasalahan pendidikan di pedalaman Papua tidak hanya dipengaruhi oleh faktor fisik dan logistik, tetapi juga oleh aspek sosial dan budaya. Gaya hidup masyarakat adat yang nomaden, rendahnya tingkat literasi orang tua, serta pandangan tradisional terhadap pendidikan formal menjadi tantangan tersendiri. Di sejumlah komunitas, pendidikan belum dianggap sebagai kebutuhan mendesak, melainkan sesuatu yang bersifat sekunder dibandingkan dengan kegiatan ekonomi subsisten atau ritual adat. Kurangnya keterlibatan orang tua dan komunitas dalam proses pendidikan menyebabkan anak-anak tidak mendapatkan dukungan yang memadai di lingkungan keluarga. Dalam beberapa kasus, anak-anak dipaksa untuk berhenti sekolah demi membantu orang tua bekerja atau karena harus mengikuti orang tua yang berpindah tempat tinggal secara berkala.

Faktor-faktor struktural seperti kemiskinan, keterisolasian, dan kurangnya infrastruktur pendukung juga memperparah persoalan pendidikan di wilayah ini. Minimnya alokasi anggaran daerah untuk sektor pendidikan, lemahnya pengawasan dan pendampingan dari dinas pendidikan, serta ketidaksesuaian kurikulum nasional dengan konteks lokal menjadikan upaya peningkatan mutu pendidikan semakin sulit. Kurikulum yang seragam dan tidak memperhatikan kearifan lokal membuat peserta didik kesulitan memahami materi pelajaran yang disampaikan. Dalam konteks ini, pendekatan yang sensitif terhadap budaya dan lingkungan lokal sangat penting untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas pendidikan. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung melihat permasalahan pendidikan di Papua dari sudut pandang makro atau normatif, seperti efektivitas kebijakan nasional, persebaran anggaran, atau indikator pembangunan pendidikan nasional. Sementara itu, studi-studi yang berfokus pada dinamika mikro di tingkat sekolah, guru, siswa, dan komunitas masih relatif terbatas. Padahal, pendekatan mikro sangat penting untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang konkret dan menawarkan solusi yang kontekstual. Penelitian dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat lokal secara langsung juga masih sangat minim, sehingga banyak strategi intervensi yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan realitas masyarakat Papua.

Dalam perspektif Ardiansyah dan Rahman (2021), kualitas pendidikan tidak hanya dapat diukur dari output berupa nilai akademik atau hasil ujian semata. Aspek yang lebih penting adalah proses pendidikan itu sendiri, yang melibatkan kompetensi guru, ketersediaan sumber daya belajar, relevansi kurikulum, serta partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. Pendidikan

yang bermutu harus mampu menjawab tantangan kehidupan nyata dan memberdayakan peserta didik untuk menjadi individu yang mandiri dan produktif. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan di daerah seperti Papua tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang bersifat top-down atau satu arah, melainkan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara kolaboratif dan berkelanjutan.

Baharuddin (2019) menegaskan bahwa transformasi pendidikan di wilayah tertinggal membutuhkan strategi yang sistematis dan berkelanjutan. Upaya tersebut mencakup peningkatan kapasitas tenaga pendidik melalui pelatihan yang berkelanjutan, penyediaan insentif yang layak bagi guru yang bertugas di daerah khusus, serta pengembangan kurikulum yang kontekstual dan adaptif. Lebih dari itu, pelibatan masyarakat lokal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan merupakan kunci keberhasilan. Masyarakat yang merasa memiliki dan berperan dalam pendidikan anak-anaknya akan lebih berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan proses pembelajaran.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara mendalam faktor-faktor yang menjadi penghambat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah pedalaman Papua. Penelitian ini juga berupaya merumuskan strategi peningkatan mutu pendidikan yang relevan dengan kondisi geografis, sosial, dan budaya setempat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Dengan menggali pengalaman langsung dari guru, siswa, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif dan berkelanjutan dalam upaya pemerataan pendidikan di wilayah 3T, khususnya Papua.

Secara lebih luas, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam diskursus akademik dan kebijakan publik mengenai pendidikan inklusif dan berkeadilan. Pendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi mereka yang tinggal di pusat-pusat kota, melainkan harus menjadi hak universal yang dijamin untuk semua warga negara, tanpa terkecuali. Anak-anak di pedalaman Papua memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas, untuk bermimpi, dan untuk membangun masa depan mereka sendiri. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab bersama terutama pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan akademisi untuk menghadirkan sistem pendidikan yang menjangkau seluruh pelosok negeri, termasuk “Tanah Mutiara Hitam” yang kaya akan potensi, namun selama ini masih diliputi oleh berbagai keterbatasan.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam situasi pendidikan di pedalaman Papua Barat, dengan tujuan mengidentifikasi hambatan dan merumuskan strategi yang kontekstual. Pendekatan kualitatif ini berlandaskan pada pemikiran Creswell (2009) yang berfokus pada eksplorasi makna, pengumpulan data deskriptif dari partisipan, dan interpretasi dalam konteks alami. Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan, dari Mei hingga Juni 2025, disekolah SD INPRES 40 Aimas Papua Barat di Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, yang dipilih karena merepresentasikan kondisi pedalaman dengan segala keterbatasannya. Partisipan penelitian adalah delapan guru aktif yang dipilih secara purposive sampling karena pemahaman langsung mereka terhadap permasalahan di sekolah. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Analisis data dilakukan secara tematik melalui tiga tahap: reduksi data untuk

menyaring informasi penting, penyajian data dalam bentuk narasi, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber (wawancara, observasi, dan dokumen) dan member check, yaitu konfirmasi data kembali kepada partisipan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah menyusun instrumen penelitian berupa panduan wawancara, pedoman observasi, dan format validasi dokumen, peneliti akan melanjutkan ke tahap pelaksanaan pengumpulan data lapangan. Tahap ini mencakup kegiatan wawancara mendalam dengan informan kunci yang telah ditentukan, observasi langsung terhadap situasi atau aktivitas yang relevan dengan fokus penelitian, serta pengumpulan dan analisis dokumen pendukung sebagai data pelengkap. Pelaksanaan ketiga teknik ini dirancang untuk saling melengkapi dan memperkuat validitas temuan melalui proses triangulasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan peneliti dapat memperoleh gambaran yang holistik dan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti sebelum masuk ke tahap analisis dan pembahasan data.

1. Keterbatasan Infrastruktur

Peneliti melakukan wawancara kepada responden mengenai kondisi sarana dan prasarana sekolah. Seluruh responden menyampaikan bahwa kondisi ruang kelas sangat memprihatinkan. Atap sering bocor, dinding kayu mulai rapuh, dan lantai masih berupa tanah. Sekolah tidak memiliki laboratorium, perpustakaan, atau ruang komputer, serta toilet yang tersedia sangat terbatas dan tidak layak pakai. Listrik tidak stabil dan belum tersedia koneksi internet memadai, padahal kegiatan administrasi menuntut sistem daring. Meja dan kursi siswa yang rusak sehingga sebagian terpaksa belajar di lantai. Ruang kelas yang ada pun tidak mencukupi dan kurang nyaman akibat ventilasi dan pencahayaan yang buruk. Beberapa guru bahkan harus membawa alat bantu sendiri dan menggunakan kuota pribadi untuk mendukung pembelajaran. Peneliti juga mengkaji akses terhadap perangkat TIK. Sekolah memiliki 8 unit perangkat, namun hanya sebagian guru dan siswa yang mampu menggunakannya karena keterbatasan keterampilan dan jaringan internet.

Observasi lapangan menguatkan hasil wawancara. Kondisi bangunan sekolah rusak, pencahayaan alami minim, dan listrik tidak stabil. Fasilitas pendukung seperti laboratorium dan perpustakaan tidak tersedia. Toilet terbatas dan tidak higienis, meja-kursi tidak seragam dan banyak yang rusak. Sebagian siswa duduk di lantai, dan pembelajaran berlangsung seadanya tanpa alat bantu visual. Lingkungan sekolah pun kurang mendukung, dengan area sekitar yang becek saat hujan dan minim fasilitas bermain.

Analisis dokumen seperti profil sekolah, data inventaris, RKAS, dan surat permohonan bantuan, menunjukkan keterbatasan sarana yang signifikan. Jumlah ruang kelas tidak memadai, peralatan belajar sangat terbatas, dan alokasi anggaran lebih banyak difokuskan pada operasional dan honorarium. Proposal bantuan telah diajukan ke instansi terkait, namun belum sepenuhnya mendapat tanggapan. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan antara kebutuhan infrastruktur pendidikan dan dukungan nyata yang diterima oleh sekolah-sekolah di wilayah pedalaman Papua.

Menurut Shakira et al. (2024), infrastruktur fisik yang buruk di sekolah-sekolah Papua Barat menjadi penyebab utama rendahnya kualitas pendidikan, karena mempersulit guru dan siswa menjalankan kegiatan belajar dengan optimal. Bahkan, keterbatasan akses jalan dan transportasi

memperburuk keadaan karena menghambat distribusi buku, alat tulis, serta keterlambatan kehadiran guru.

Senada dengan itu, Koesnandar (2023) juga mengatakan bahwa infrastruktur pendidikan tidak hanya menyangkut bangunan fisik, tetapi juga termasuk ketersediaan listrik dan akses internet. Di banyak daerah 3T (tertinggal, terpencil, dan terluar), seperti Papua, ketidaktersediaan fasilitas ini membuat proses pembelajaran berbasis teknologi menjadi sulit diterapkan. Oleh karena itu, diperlukan strategi infrastruktur yang bersifat adaptif dan sesuai dengan kondisi geografis serta sosial masyarakat setempat.

Salah satu solusi inovatif yang dapat digunakan adalah pemanfaatan panel surya off-grid, seperti yang dijelaskan oleh Ramadhanti et al. (2019), untuk memenuhi kebutuhan penerangan dan pengisian daya alat belajar di sekolah-sekolah terpencil. Strategi ini memungkinkan kegiatan belajar tetap berlangsung meski tidak terjangkau oleh jaringan listrik konvensional.

Berdasarkan data dari Bappenas dan Kemendikbudristek (2023), lebih dari 60% sekolah dasar di wilayah Papua masih berada dalam kondisi tidak memenuhi standar layanan minimal, terutama dari sisi fisik dan fasilitas pembelajaran. Hal ini menguatkan bahwa temuan di lapangan bukanlah kasus tunggal, tetapi bagian dari persoalan sistemik yang dialami banyak sekolah di pedalaman Indonesia.

Mengatasi keterbatasan infrastruktur pendidikan di pedalaman Papua tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang bersifat umum. Diperlukan strategi yang adaptif, partisipatif, dan berbasis konteks lokal, agar solusi yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat dijalankan secara berkelanjutan.

Salah satu strategi yang bisa diterapkan adalah pembangunan ruang kelas semi permanen menggunakan bahan lokal seperti kayu, bambu, atau bahan alam lainnya yang tersedia di sekitar lingkungan masyarakat. Selain lebih murah, strategi ini juga melibatkan masyarakat lokal dalam proses pembangunan, sehingga tumbuh rasa memiliki terhadap fasilitas pendidikan. Hal ini sejalan dengan pandangan Jean et al. (2020) yang menyebut bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dilakukan hanya dari atas (top-down), tetapi harus melibatkan komunitas sekolah dan masyarakat sekitar secara aktif.

Selain itu, penggunaan panel surya off-grid sangat penting untuk mengatasi keterbatasan listrik di daerah yang belum terjangkau jaringan PLN. Dengan adanya panel surya, kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan di malam hari atau saat cuaca mendung tanpa khawatir kekurangan penerangan. Penelitian dari Ramadhanti et al. (2019) menunjukkan bahwa sistem panel surya skala kecil sudah terbukti efektif digunakan di desa-desa terpencil sebagai sumber penerangan alternatif yang terjangkau dan mudah perawatan.

Pojok baca berbasis komunitas dan perpustakaan keliling juga dapat dijadikan solusi kreatif untuk keterbatasan buku dan sumber belajar. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan cara swadaya masyarakat atau kerja sama dengan lembaga nonpemerintah. Pendekatan ini didukung oleh Santy, N., & Septiono, T. Z. (2019) yang menyarankan pentingnya pendidikan berbasis budaya dan masyarakat sebagai bagian dari pendidikan yang demokratis dan membumi.

Tidak kalah penting adalah membangun kemitraan antara pemerintah daerah, LSM, dan pihak swasta dalam pengadaan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan. Model kolaborasi ini sudah banyak diterapkan dalam program pendidikan di daerah 3T dan terbukti mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan (Jumriani & Hartono, 2019). Dengan demikian, proses peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah pusat, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab sosial bersama.

2. Tenaga pendidik yang berkualitas

Peneliti melanjutkan kajian pada aspek tenaga pendidik yang berkualitas. Sebagian besar responden menyampaikan bahwa ketersediaan tenaga pendidik masih menjadi tantangan serius di sekolah mereka. Jumlah guru yang ada belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seluruh mata pelajaran, terutama pada jenjang menengah. Bebebrap guru merangkap mengajar lebih dari satu bidang studi di luar latar belakang pendidikannya karena keterbatasan sumber daya manusia. Beberapa guru juga merupakan lulusan non-kependidikan dan belum memiliki sertifikasi atau pelatihan pedagogik yang memadai.

Dalam hal kompetensi, responden menyebutkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam penguasaan metode pembelajaran aktif dan pemanfaatan teknologi. Sebagian guru belum terbiasa menggunakan media pembelajaran berbasis digital karena kurangnya pelatihan dan akses terhadap perangkat TIK. Meskipun demikian, responden juga menyoroti dedikasi tinggi para guru yang tetap mengajar dengan segala keterbatasan.

Selain itu, responden menyampaikan bahwa pengembangan profesional guru jarang dilakukan secara rutin. Kegiatan seperti pelatihan, workshop, atau komunitas belajar sulit dijalankan karena keterbatasan akses, dana, dan pendampingan dari dinas pendidikan. Beberapa guru mengaku belum pernah mengikuti pelatihan dalam 2–3 tahun terakhir.

Hasil observasi menunjukkan bahwa jumlah guru di sekolah masih terbatas dan belum mencukupi untuk semua mata pelajaran. Beberapa guru mengajar lintas bidang di luar kompetensinya. Proses pembelajaran umumnya berlangsung secara konvensional, tanpa media pembelajaran atau teknologi. Guru terlihat kurang terbiasa dengan metode pembelajaran aktif dan masih kesulitan dalam menyusun perangkat ajar secara sistematis.

Kedisiplinan dan semangat mengajar cukup tinggi meskipun medan tempuh ke sekolah sulit. Namun, sarana pendukung pengembangan profesional seperti pelatihan, akses internet, dan komunitas belajar tidak tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa meski ada dedikasi, guru masih menghadapi banyak keterbatasan dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi profesional mereka.

Analisis dokumen menunjukkan bahwa sebagian guru belum bersertifikasi dan berlatar belakang non-kependidikan. Dokumen RKAS tidak memuat program pelatihan atau peningkatan kompetensi guru secara khusus, karena anggaran lebih difokuskan pada operasional dan honorarium. Tidak ditemukan bukti kegiatan pembinaan, supervisi, atau pelatihan rutin. Temuan ini mengonfirmasi bahwa dukungan administratif terhadap peningkatan kualitas guru masih sangat terbatas.

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Menyebutkan bahwa guru yang profesional harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Hal ini dipertegas pula dalam Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi kepribadian, kompetensi guru harus memenuhi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Agar kompetensi guru selalu adaptif perlu dilakukan pengembangan profesional dan pelatihan. Menurut Tokhibin & Wuradji (2013), pengembangan kompetensi dan motivasi guru melalui pelatihan berkala terbukti meningkatkan kinerja guru secara signifikan, karena membangun disiplin dan komitmen pengajar terhadap tugasnya.

Perubahan kualitas pembelajaran sangat terkait dengan dukungan sistematis terhadap pengembangan guru. Dalam satuan pendidikan, peran kepala sekolah sangat memiliki andil

untuk keberlangsungan pengembangan profesional dan pelatihan guru. Berdasarkan kajian sebelumnya dalam Mulder, D. O. (2024) disebutkan bahwa saat ini model kepemimpinan transformasional sangat relevan. Kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang dicirikan oleh pemimpin yang memberikan pengaruh kepada anggota atau bawahannya yang menginspirasi, memotivasi, dan mendorong perubahan organisasi yang konstruktif.

Untuk mengatasi masalah kekurangan guru di pedalaman Papua, diperlukan strategi yang komprehensif dan sesuai dengan konteks lokal. Pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan insentif dan tunjangan khusus bagi guru yang bersedia mengabdikan di wilayah 3T, seperti penyediaan rumah dinas, tambahan penghasilan, serta tunjangan transportasi yang layak. Insentif ini penting agar para guru merasa dihargai dan terdorong untuk bertahan lebih lama di tempat tugas. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu mengembangkan program rekrutmen guru lokal, melalui beasiswa pendidikan dan pelatihan intensif, sehingga masyarakat setempat dapat diberdayakan menjadi tenaga pendidik. Strategi ini tidak hanya memperkuat ikatan antara guru dan komunitas, tetapi juga menjamin keberlanjutan tenaga pengajar dalam jangka panjang. Di samping itu, penguatan dukungan logistik dan teknologi juga sangat penting, seperti sistem pembayaran gaji secara digital, pelatihan daring berkala, serta penyediaan transportasi reguler yang aman dan terjangkau. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih adil dan bermutu di wilayah pedalaman Papua.

3. Penerapan Kurikulum

Pada sub bagian ini, peneliti mendalami aspek kurikulum yang diterapkan di sekolah. Responden menyampaikan bahwa penerapan kurikulum di sekolah mereka masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun kurikulum nasional seperti Kurikulum Merdeka mulai diperkenalkan, implementasinya belum berjalan optimal karena kurangnya pelatihan, panduan teknis, dan pendampingan. Guru merasa kesulitan dalam memahami alur tujuan pembelajaran, menyusun modul ajar, dan melakukan asesmen berbasis proyek atau diferensiasi. Beberapa guru juga menyatakan bahwa beban administratif dan keterbatasan fasilitas menghambat mereka untuk menerapkan pendekatan pembelajaran yang aktif dan kontekstual. Selain itu, sebagian guru masih terpaku pada pola lama yang berfokus pada penuntasan materi daripada pengembangan kompetensi siswa secara menyeluruh.

Peneliti melanjutkan dengan kegiatan observasi untuk mengutakan data wawancara. Hasil observasi menunjukkan bahwa penerapan kurikulum di kelas masih bersifat konvensional, didominasi metode ceramah dan hafalan. Guru belum menerapkan pendekatan pembelajaran aktif, berdiferensiasi, atau berbasis proyek seperti yang dianjurkan dalam Kurikulum Merdeka. Tidak tampak penggunaan modul ajar, asesmen autentik, atau pemanfaatan media pembelajaran yang variatif. Aktivitas pembelajaran cenderung berpusat pada guru, dan siswa kurang dilibatkan dalam proses eksplorasi atau diskusi. Hal ini mencerminkan keterbatasan pemahaman dan keterampilan guru dalam mengimplementasikan kurikulum secara utuh sesuai dengan tuntutan terbaru.

Validasi dokumen seperti silabus, dan modul ajar menunjukkan bahwa implementasi kurikulum belum sepenuhnya mengacu pada prinsip Kurikulum Merdeka. RPP yang diperiksa masih menggunakan format lama, tidak mencerminkan pembelajaran berdiferensiasi atau asesmen autentik. Modul ajar belum disusun secara mandiri oleh guru, dan sebagian besar hanya menggunakan materi dari buku teks nasional tanpa penyesuaian dengan kebutuhan dan konteks lokal. Tidak ditemukan dokumen rencana proyek atau portofolio siswa sebagai bagian dari

asesmen berbasis kinerja. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan kurikulum secara administratif masih bersifat formal dan belum mencerminkan semangat kurikulum yang transformatif.

Penerapan kurikulum di sekolah pedalaman Papua Barat, implementasi kurikulum misalnya Kurikulum Merdeka masih menemui kendala signifikan. Guru melaporkan bahwa ketidaktersediaan pelatihan teknis, pendampingan yang terbatas, dan kurangnya pengembangan perangkat pembelajaran membuat mereka kesulitan menjalaninya. Alur tujuan pembelajaran dan modul ajar belum tersusun secara mandiri, dan guru masih bergantung pada metode ceramah dan hafalan serta buku teks nasional tanpa penyesuaian lokal.

Menurut Gita Novia et al. (2023), keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka sangat bergantung pada kesiapan guru, yang dapat ditingkatkan melalui pelatihan praktis, penyusunan modul ajar mandiri, dan pemberian contoh konkret penerapan di kelas. Modul ajar berfungsi sebagai panduan fleksibel yang disusun guru untuk merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan kebutuhan lokal. Modul ini menjadi alat bantu utama agar pembelajaran lebih kontekstual, menarik, dan terukur. Mereka merekomendasikan pelatihan berbasis praktik langsung dan pendampingan berkelanjutan agar kompetensi guru terus berkembang.

Dalam konteks Kurikulum Merdeka, asesmen autentik memegang peranan krusial. Ini bukan sekadar tentang hasil ujian tertulis, melainkan penilaian komprehensif terhadap kemampuan siswa melalui produk nyata, proyek, atau portofolio. Pendekatan ini memungkinkan guru untuk memahami proses belajar siswa secara utuh dan memberikan umpan balik yang lebih bermakna, seperti yang ditegaskan oleh Irwandi et al. (2023). Lebih dari itu, asesmen autentik juga mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan pemecahan masalah karena mereka ditantang untuk menerapkan pengetahuan dalam situasi dunia nyata. Hal ini sejalan dengan tujuan Kurikulum Merdeka yang menekankan pada pengembangan profil pelajar Pancasila, di mana siswa diharapkan menjadi pembelajar yang mandiri, bernalar kritis, dan adaptif. Dengan demikian, asesmen autentik tidak hanya menjadi alat ukur, tetapi juga bagian integral dari proses pembelajaran yang mendorong pertumbuhan holistik siswa dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di masa depan.

Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan guru menyesuaikan pendekatan, metode, dan konten belajar sesuai gaya belajar dan kemampuan siswa. Begitu pula pembelajaran berbasis proyek mendorong siswa aktif menyelesaikan tugas nyata yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif.

Penerapan kurikulum yang efektif di sekolah pedalaman memerlukan strategi komprehensif yang berpusat pada pengembangan profesional guru dan relevansi konten. Pertama, pelatihan dan lokakarya harus fokus pada praktik langsung, seperti penyusunan modul ajar, RPP berdiferensiasi, dan desain proyek pembelajaran. Ini didukung oleh pendampingan intensif dari fasilitator atau pengawas, memastikan guru tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu menerapkannya di kelas. Kedua, penting untuk menguatkan budaya kolaborasi antar guru dalam menyusun dan merefleksikan pelaksanaan kurikulum. Terakhir, penyesuaian konten pembelajaran dengan konteks budaya lokal sangat krusial agar materi menjadi lebih relevan dan mudah dipahami oleh siswa.

Dengan penerapan strategi tersebut, pelaksanaan kurikulum diharapkan tidak lagi bersifat administratif semata, melainkan benar-benar menjadi sarana transformasi pembelajaran yang berpihak pada kebutuhan dan potensi siswa.

4. Tantangan Geografis

Peneliti melanjutkan wawancara terkait tantangan geografis yang riil dihadapi. Para responden menyampaikan bahwa kondisi geografis menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan pendidikan di wilayah mereka. Akses menuju sekolah sangat sulit, dengan medan berat seperti jalan berlumpur, sungai tanpa jembatan, dan jalur yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki berjam-jam. Pada musim hujan, sebagian siswa dan guru tidak dapat hadir karena banjir atau jalan terputus. Tantangan ini tidak hanya memengaruhi kehadiran, tetapi juga keterlambatan distribusi buku, alat tulis, serta minimnya kunjungan dari dinas atau pelatihan guru. Responden juga menyebut bahwa jaringan internet dan sinyal telepon sangat terbatas, bahkan tidak tersedia di beberapa lokasi, sehingga komunikasi dan pelaporan daring menjadi terhambat. Kondisi geografis ini berdampak langsung pada rendahnya akses, kontinuitas belajar, dan terbatasnya pengembangan profesional guru.

Hasil observasi menunjukkan bahwa lokasi sekolah berada di wilayah terpencil dengan akses yang sangat terbatas. Jalan menuju sekolah berupa tanah berbatu, licin saat hujan, dan tidak dapat dilalui kendaraan bermotor. Fasilitas transportasi umum tidak tersedia, dan tidak ada penunjang seperti papan petunjuk, penerangan jalan, atau pos pengamanan. Di lingkungan sekolah juga tidak tersedia akses internet dan sinyal telepon yang stabil. Kondisi geografis ini terlihat nyata menghambat kehadiran guru dan siswa secara rutin serta menyulitkan distribusi logistik pendidikan seperti buku, perangkat TIK, dan bahan ajar.

Analisis dokumen seperti profil sekolah, laporan tahunan, serta dokumen usulan bantuan menunjukkan bahwa lokasi sekolah termasuk dalam kategori daerah terpencil dan sulit dijangkau. Dokumen mencantumkan minimnya akses transportasi, ketiadaan jembatan, serta kesulitan distribusi sarana belajar. Dalam beberapa laporan, dicatat adanya ketidakteraturan kehadiran guru dan siswa akibat kondisi medan yang ekstrem, terutama saat musim hujan. Proposal bantuan yang diajukan sekolah juga sering memuat permohonan pembangunan infrastruktur penunjang akses seperti jalan beraspal, dan jembatan yang memadai. Dokumen-dokumen ini menegaskan bahwa tantangan geografis merupakan hambatan nyata dan berkelanjutan yang berdampak langsung pada efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Menurut Putri Nabila et al. (2024) Tantangan geografis adalah masalah atau hambatan yang timbul akibat karakteristik fisik suatu wilayah, seperti topografi (medan), iklim, lokasi, aksesibilitas, dan ketersediaan sumber daya alam, yang secara signifikan memengaruhi aktivitas manusia dan pembangunan di daerah tersebut.

Dalam kajiannya Febriana et al. (2023) menyebutkan bahwa letak geografis merupakan tantangan pendidikan mengakibatkan kesinambungan pembelajaran yang tidak memadai dan sedikitnya kesempatan untuk pertumbuhan profesional guru. Guru merasa sulit untuk mengadopsi strategi pengajaran yang mutakhir atau menyesuaikan diri dengan kurikulum terbaru, dan siswa kehilangan kesempatan untuk belajar. Kesenjangan pendidikan semakin melebar sebagai akibat dari perbedaan kualitas pendidikan yang mencolok antara sekolah-sekolah di perkotaan dan pedesaan.

Sejumlah strategi diperlukan untuk mengatasi kesenjangan pendidikan yang disebabkan oleh kesulitan topografi pedalaman Papua Barat. Pertama dan terutama, sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan infrastruktur dengan membangun dan memperbaiki jalan dan jembatan menuju sekolah, dengan memprioritaskan jalan yang paling sering digunakan dan rentan terhadap cuaca buruk. Hambatan kehadiran juga dapat dikurangi dengan membangun

fasilitas perumahan guru yang dekat dengan sekolah dan menawarkan moda transportasi alternatif.

Kedua, bahkan dengan teknologi yang terbatas, masih memungkinkan untuk memaksimalkan penggunaannya. Hal ini termasuk mendistribusikan modul pembelajaran digital offline bertenaga surya, membeli radio komunikasi untuk koordinasi darurat, dan melakukan studi kelayakan untuk proyek percontohan internet satelit di tempat-tempat yang sangat terpencil untuk memberikan akses ke informasi penting.

Selain itu, sangat penting untuk membuat kurikulum dan materi pembelajaran yang sesuai dengan konteks. Meskipun modul mandiri dapat dibuat agar siswa dapat belajar dengan sedikit bantuan, materi instruksional yang dicetak harus dibuat agar tahan lama dan tahan air. Relevansi dan motivasi siswa juga dapat ditingkatkan dengan memasukkan adat istiadat, cerita rakyat, atau kearifan lokal ke dalam kurikulum.

Keempat, sangat penting untuk meningkatkan dukungan profesional dan kapasitas guru. Jika akses ke internet menjadi masalah, pelatihan guru dapat dilakukan melalui media lain, seperti modul cetak atau rekaman audio/video. Agar mereka tetap terlibat, program rotasi guru dengan imbalan dan dukungan psikososial yang memadai harus dipertimbangkan.

Terakhir, pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan sangat penting. Dukungan lokal dapat ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat, orang tua, dan tokoh adat dalam pemeliharaan infrastruktur sekolah dan distribusi logistik. Dalam penelitiannya Taurista & Choiriyah (2024) mengatakan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Setiap anak harus mendapatkan akses pendidikan yang layak melalui kerja sama dengan universitas dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta kampanye kebijakan afirmasi pendidikan di daerah pedesaan. Kombinasi taktik ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendidikan di Papua Barat.

5. Kondisi Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat.

Pada sub bagian ini, peneliti melakukan wawancara terkait kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Para responden menyampaikan bahwa sebagian besar masyarakat di sekitar sekolah memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan penghasilan yang terbatas. Banyak orang tua bekerja sebagai petani, nelayan, atau buruh harian dengan penghasilan yang tidak tetap. Hal ini berdampak pada keterbatasan dukungan terhadap pendidikan anak, baik secara finansial maupun dalam hal pendampingan belajar di rumah.

Secara sosial budaya, masih terdapat pandangan bahwa pendidikan formal belum menjadi prioritas utama. Beberapa keluarga menikahkan anak pada usia dini atau mengajak anak membantu pekerjaan rumah dan kebun, sehingga kehadiran dan konsistensi belajar terganggu. Selain itu, keterbatasan pemahaman terhadap pentingnya pendidikan menyebabkan rendahnya keterlibatan orang tua dalam kegiatan sekolah. Namun demikian, responden juga mencatat bahwa sebagian orang tua mulai menunjukkan minat terhadap pendidikan jika ada pendekatan yang persuasif dari guru dan sekolah.

Hasil observasi menunjukkan bahwa masyarakat sekitar sekolah hidup dalam kondisi ekonomi yang sederhana, dengan rumah-rumah sederhana, fasilitas dasar yang minim, dan keterbatasan akses terhadap layanan publik seperti listrik, air bersih, dan transportasi. Aktivitas masyarakat didominasi oleh pertanian subsisten dan pekerjaan informal lainnya. Secara sosial, keterlibatan orang tua dalam kegiatan sekolah terpantau rendah. Tidak banyak terlihat partisipasi dalam pertemuan sekolah atau kegiatan belajar anak di rumah. Beberapa siswa tampak datang ke

sekolah tanpa perlengkapan belajar yang memadai, dan sebagian lainnya sering terlambat atau tidak hadir karena membantu pekerjaan keluarga. Dari sisi budaya, nilai-nilai tradisional masih kuat, dan dalam beberapa kasus, terlihat adanya jarak antara praktik pendidikan formal dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan pendidikan yang lebih adaptif dan komunikatif dengan konteks lokal.

Analisis terhadap dokumen seperti profil sekolah, data peserta didik, dan laporan kegiatan sekolah menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua siswa berprofesi sebagai petani, buruh, atau nelayan, dengan tingkat pendidikan rendah dan penghasilan tidak tetap. Dokumen juga mencatat rendahnya tingkat partisipasi orang tua dalam kegiatan sekolah seperti rapat komite atau program pendampingan belajar. Dalam laporan sekolah, tercatat pula adanya hambatan komunikasi dengan orang tua akibat keterbatasan bahasa dan akses teknologi. Beberapa siswa tercatat mengalami ketidakhadiran tinggi yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi keluarga. Selain itu, dokumen program sekolah belum banyak memuat strategi yang secara khusus merespons konteks sosial budaya masyarakat lokal, baik dalam bentuk muatan lokal maupun pendekatan kolaboratif dengan komunitas.

Temuan ini memperkuat bahwa latar belakang sosial budaya dan ekonomi masyarakat sekitar sekolah menjadi faktor signifikan yang memengaruhi keberlangsungan pendidikan dan keterlibatan keluarga dalam proses pembelajaran.

Studi oleh Primanda & Oktora (2023) memperlihatkan keterkaitan erat antara kemiskinan dan rendahnya akses pendidikan di Papua Barat, menunjukkan bahwa semakin miskin suatu keluarga, semakin kecil kemungkinan anak-anaknya untuk lanjut sekolah. Selain itu, pengeluaran pemerintah daerah di sektor pendidikan dan kesehatan juga berpengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan yang berarti program dukungan langsung sangat diperlukan untuk memecahkan siklus ini (Futunanembun et al., 2023).

Meningkatkan kualitas pendidikan di pedalaman Papua Barat membutuhkan strategi komprehensif yang melampaui batas sekolah. Penting untuk melibatkan masyarakat luas sambil tetap menghargai budaya lokal. Program edukasi tentang manfaat pendidikan, khususnya bagi orang tua dan tokoh adat, harus diselenggarakan melalui forum adat atau kegiatan komunitas. Pendekatan ini, seperti yang diungkapkan Jaizul & Surya (2023) dalam studi di Teluk Bintuni, dapat secara signifikan meningkatkan kesadaran sosial dan dukungan terhadap pendidikan ketika disajikan sebagai bagian dari proses pembelajaran bersama.

Selain itu, intervensi ekonomi memiliki peran krusial, misalnya melalui bantuan alat sekolah atau beasiswa lokal. Riset oleh Makiko Sekiyama et al. (2018) menunjukkan bahwa program pemberian makanan di sekolah, meskipun cakupannya terbatas, terbukti berdampak signifikan pada peningkatan status gizi, kehadiran, dan partisipasi belajar siswa. Bahkan, penelitian lebih lanjut menyarankan bahwa model pendanaan bersama antara pemerintah dan orang tua dapat memperluas efektivitas program semacam ini.

Oleh karena itu, pendekatan terpadu yang menggabungkan peningkatan akses pendidikan, penguatan dukungan budaya komunitas, dan penyediaan bantuan ekonomi nyata seperti makanan sekolah gratis, menjadi strategi yang sangat ampuh untuk memutus siklus kemiskinan yang kerap terjadi di banyak desa pedalaman Papua Barat.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah utama yang memengaruhi kualitas pendidikan di pedalaman Papua, yang dikenal sebagai "Tanah Mutiara Hitam". Keterbatasan infrastruktur menjadi kendala signifikan, meliputi kondisi bangunan sekolah yang rusak, minimnya akses internet dan listrik, serta sulitnya akses jalan. Selain itu, terdapat kekurangan dan ketidakmerataan tenaga pendidik berkualitas, di mana guru seringkali merangkap jabatan dan kurang mendapatkan pelatihan profesional.

Tantangan geografis yang ekstrem serta kurikulum yang kurang relevan dengan konteks lokal juga menjadi hambatan berarti dalam proses pendidikan. Situasi ini diperparah oleh faktor sosial-budaya dan ekonomi masyarakat regional, seperti pandangan tradisional terhadap pendidikan formal dan tingkat pendidikan orang tua yang rendah, yang berdampak pada rendahnya dukungan terhadap pendidikan anak.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup strategi komprehensif. Strategi tersebut meliputi pembangunan infrastruktur yang adaptif, peningkatan kesetaraan dan kapasitas guru, pengembangan kurikulum berbasis kearifan lokal, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pendidikan jarak jauh, serta penguatan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung pendidikan. Implementasi strategi ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang berkeadilan di pedalaman Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Alik, H. R. (2024). *Analisis Rendahnya Pendidikan di Pelosok Papua Intan Jaya*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 12520–12529. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/14292>
- Ardiansyah, M., & Rahman, A. (2021). *Guru Indonesia dan Kualitas Pendidikan Nasional*. Jakarta: DPR RI. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/buku_tim/buku-tim-public-63.pdf
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia 2023: Provinsi Papua*. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. <https://papua.bps.go.id/publication.html>
- Baharuddin. (2019). *Manajemen Strategik Mutu Pendidikan*. *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 3(1), 155–163.
- Bappenas & UNICEF. (2023). *Ketidakhadiran Guru di Tanah Papua: Analisis dan Rekomendasi Kebijakan*. Jakarta: Bappenas. <https://www.unicef.org/indonesia/media/20406/file/Ketidakhadiran%20Guru%20di%20Tanah%20Papua.pdf>
- Bappenda Provinsi Papua. (2024). *Paper Pendidikan Papua*. Jayapura: Bappenda Provinsi Papua. <https://bapperida.papua.go.id/file/Paper%20Pendidikan%20Papua1.pdf>
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE. https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_609332/objava_105202/fajlovi/Creswell.pdf?utm_source
- Febriana, M., Nurkamto, J., Rochsantiningsih, D., & Muhtia, A. (2023). *Teaching in rural Indonesian schools: Teachers' challenges*. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 13(1), 85–104. <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/305/232>
- Futunanembun, B. A., Rorong, I. P. F., & Siwu, H. F. D. J. (2023). *Pengaruh Belanja Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Papua Barat*.

- Techno-Socio Ekonomika*, <https://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/techno-socio-ekonomika/article/view/1480>
- Irwandi, I., Sofian, I., & Annisa, P. A. (2023). Pelatihan implementasi Kurikulum Merdeka untuk guru SD di Jerowaru, Lombok Timur. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 7(2).
<https://journal.ummat.ac.id/index.php/jpmb/article/view/27256/10918>
- Jaizul, A., & Surya, D. (2023). Peran pendidikan dalam meningkatkan kesadaran sosial dan partisipasi masyarakat di Teluk Bintuni, Papua Barat. *International Journal of Business, Economics and Social Development*, 4(1).
<https://journal.rescollacomm.com/index.php/ijbesd/article/view/880/pdf>
- Jean, P., Sucihatiningsih, & Rusdarti. (2020). Model pelatihan vokasional berbasis pemanfaatan rebung bambu pada masyarakat desa. *Journal of Vocational and Career Education*, 2(1), 45–60.
<https://journal.unnes.ac.id/nju/jvce/article/view/11107/0>
- Jumriani, S., & Hartono, W. (2019). Pengembangan infrastruktur pendidikan berbasis masyarakat lokal: Studi kasus di Sulawesi Selatan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 4(2), 45–58.
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/23213/12047>
- Kemendikbudristek. (2022). *Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2022–2030*.
<https://puslapdik.kemdikbud.go.id>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2023). *Laporan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan di Daerah 3T*.
<https://bappenas.go.id>
- Koesnandar, A. (2023). Pengembangan Inovasi Pembelajaran Berbasis TIK pada Sekolah di Daerah 3T Papua dan Papua Barat melalui Pendampingan Jarak Jauh. *Kwangsan: Jurnal Teknologi Pendidikan*, 6(2), 177–198.
<https://jurnalkwangsan.kemdikbud.go.id/index.php/jurnalkwangsan/article/view/104>
- Mulder, D. O. (2024). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru di SMA Koinonia Sentani Kabupaten Jayapura. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(5), 185–189.
[https://japendi.publikasiindonesia.id/index.php/japendi/article/view/2770?utm_source=Nabila,P.,Tinendung,H.F.,Tinendung,L.K.,Efendi,M.T.,Hasibuan,T.,&Yusnaldi,E.\(2024\).PengaruhKondisiGeografisTerhadapPendidikanDasardiIndonesia:StudiLiteraturPadaPendidikanSD/MI.WidyaBalina,9\(2\),193–201.https://journal.staidenpasar.ac.id/index.php/wb/article/view/673](https://japendi.publikasiindonesia.id/index.php/japendi/article/view/2770?utm_source=Nabila,P.,Tinendung,H.F.,Tinendung,L.K.,Efendi,M.T.,Hasibuan,T.,&Yusnaldi,E.(2024).PengaruhKondisiGeografisTerhadapPendidikanDasardiIndonesia:StudiLiteraturPadaPendidikanSD/MI.WidyaBalina,9(2),193–201.https://journal.staidenpasar.ac.id/index.php/wb/article/view/673)
- Novia, G., Hendriawan, D., Mulyasari, E., Triwahyuni, I., & Syahirah, N. I. (2023). Persepsi guru terhadap program pelatihan dan kesiapan implementasi Kurikulum Merdeka di SDN Binong. *Kalam Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 13(1).
<https://jurnal.uns.ac.id/jkc/article/view/97014>
- Primanda, E., & Oktora, S. I. (2023). Analisis Ketimpangan Pendidikan di Provinsi Papua Barat. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 6(2), 115–135.
<https://jurnal.usk.ac.id/JPED/article/view/16388/13254>
- Ramadhanti, S., Reza, M. R., & Cahyantari, E. (2019). Desain Sistem Penggunaan Panel Surya Off-grid untuk Lampu Belajar Siswa di Desa Terpencil. *eProceedings of Engineering*, 6(1).
<https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/engineering/article/view/8741/8607>
- Raynaldo, F. R. (2023). Tantangan guru SD mengajar di pedalaman Papua Barat: studi di 6 sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan dan Lingkungan Papua*, 5(1), 45–58.

- <https://ejurnal.iainsorong.ac.id/index.php/jaser/article/download/1250/885/3335>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Negara. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49320/uud-1945>
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>
- Santy, N., & Septiono, T. Z. (2019). *Peran aktif taman baca masyarakat dalam pembentukan pengetahuan: studi kasus Perpustakaan Anak Bangsa, Malang*. *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 21(2), <https://repository.ub.ac.id/172849/1/Zendy%20Titis%20Dwi%20Andini.pdf>
- Sekiyama, M., et al. (2022). *Parent Willingness to Pay for School Feeding Programs in Indonesia*. *Nutrients*, 15(14):3212. <https://www.mdpi.com/2072-6643/15/14/3212>
- Sekiyama, M., Kawakami, T., Nurdiani, R., et al. (2018). *School Feeding Programs in Indonesia*. *Japanese Journal of Nutrition and Dietetics*, 76(Suppl. S86), S86–S97. https://www.jstage.jst.go.jp/article/eiyogakuzashi/76/Supplement/76_S86/pdf
- Shakira, B. O., et al. (2024). *Analisis Infrastruktur Jalan dan Pendidikan Sebagai Tantangan di Provinsi Papua Barat*. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 1(4), 90–105. <https://journal.appihi.or.id/index.php/Terang/article/view/642>
- Taurista, H., & Choiriyah, I. U. (2024). *Community Participation in Development Planning is Driven by Leadership, Communication, and Education*. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 15(3). <https://ijccd.umsida.ac.id/index.php/ijccd/article/view/1080>
- Terang (Journal). (2024). *Analisis Infrastruktur Jalan dan Pendidikan sebagai Tantangan Demokrasi dan Tata Kelola di Provinsi Papua Barat*. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 1(4), 218–237. <https://journal.appihi.or.id/index.php/Terang/article/download/642/937/3507>
journal.appihi.or.id+1journal.appihi.or.id+1
- Tokhibin, T., & Wuradji, W. (2013). *Pengaruh Kepemimpinan Transformatif Kepala Sekolah, Kompetensi, Motivasi dan Kedisiplinan Guru Terhadap Kinerja Guru SMK di Magelang*. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 1(2), 308–320. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jamp/article/view/2402/1998>
- UNICEF Indonesia. (2020). *Strategi pendidikan berbasis budaya dan konteks lokal di Tanah Papua*. [file:///D:/FILEFILE%20JURNAL%20SINTA%203/Hasil%20dan%20Diskusi/UNICEF%20Indonesia.%20\(2020\)..pdf](file:///D:/FILEFILE%20JURNAL%20SINTA%203/Hasil%20dan%20Diskusi/UNICEF%20Indonesia.%20(2020)..pdf)
- Warami, H. (2018). *Pendidikan literasi berbasis budaya Papua: ancaman literasi kelompok masyarakat*. Universitas Papua, Manokwari. file:///C:/Users/ivanz/Downloads/PENDIDIKANLITERASIBERBASISBUDAYA_PAPUA.pdf
- Yayasan Indonesia Mengajar. (2022). *Laporan Tahunan: Pendidikan Dasar di Wilayah Terpencil Papua*. Jakarta: YIM. <https://indonesiamengajar.org/publikasi>